

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

# 1. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Buleleng pada Triwulan IV Tahun 2025

1. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Buleleng pada triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Prosentase	Keterangan
1	Oktober	0,28%	Inflasi
2	Nopember	0,47%	Inflasi
3	Desember	0,69%	Inflasi

- Pada bulan Oktober 2025 Kota Singaraja tercatat mengalami Inflasi *month to month* (m to m) setinggi 0,28%, pada oktober 2025 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Singaraja sebesar 2,47% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,13.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada oktober 2025, antara lain: cabai merah, daging ayam ras, daging babi, emas perhiasan, apel, kue basah, mie, sigaret kretek tangan (SKT), salak, bayam, sigaret putih mesin (SPM), sabun detergen bubuk, wortel, jeruk, buncis, ikan kembung/ikan gembung, vitamin, jahe, lengkuas, minuman ringan.

- Pada bulan Nopember 2025 Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi *month to month* (m to m) setinggi 0,47%, pada nopember 2025 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Singaraja sebesar 2,12%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,64. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada nopember 2025, antara lain: bawang merah, emas perhiasan, pisang, cabai merah, tomat, kangkung, tongkol diawetkan, daun seledri, obat dengan resep, wortel, apel, minyak goreng, sawi hijau, garam, daging babi, telur ayam ras, labu siam/jipang, cumi-cumi, bayam, dan ikan kembung/ikan gembung.
- Pada bulan Desember 2025 Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi *month to month* (m to m) setinggi 0,69%, pada desember 2025 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Singaraja sebesar 2,51%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,40. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2025, antara lain: cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, popok bayi sekali pakai/ diapers, emas perhiasan, bensin, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, udang basah, minyak goreng, telur ayam ras, jagung manis, sabun cair/cuci piring, cumi-cumi, labu siam/jipang, tauge/kecambah, sikat gigi, bawang putih, semangka, dan daun seledri.
- Akumulasi Persentase Perubahan Indeks Harga konsumen pada Bulan Desember 2025

terhadap Indeks Harga Konsumen Bulan Desember 2024, terjadi Inflasi sebesar 2,51%.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Buleleng pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Fluktuasi harga komoditas pangan di Kabupaten Buleleng masih tinggi seperti bawang merah, bawang putih, beras, cabai rawit, cabai besar, daging ayam ras, telur ayam ras dan daging babi.
2. Distribusi dan rantai pasokan tidak optimal disebabkan karena hasil panen cabai rawit sebagian dijual ke luar kabupaten, sehingga pasokan lokal berkurang.
3. Musim Hujan dan faktor cuaca yang menyebabkan gangguan produksi holtikultura, resiko serangan OPT dan gangguan produksi lainnya.
4. Pengaruh momen hari Raya/Agama, Upacara Manusa/Dewa Yadnya terhadap permintaan menyebabkan permintaan pangan meningkat drastis, yang dapat memicu lonjakan harga jika pasokan berkurang.
5. Belum terealisasinya bantuan Biaya Buruh dan Transportasi untuk membantu meringankan biaya operasional serta mendukung kelancaran distribusi.

1. Harga barang dari Supplier yang cenderung di atas HET sehingga perlu adanya subsidi harga agar bisa menjual barang sesuai ketentuan dari Pemerintah.
2. Masih minimnya stock cadangan pangan di Kabupaten Buleleng utamanya Beras saat menghadapi musim kerte masa/musim tanam. Sehingga terjadinya lonjakan harga Beras.
3. Kendala cuaca musim hujan, khususnya produk cabai dan beras sehingga menyebabkan gangguan pasokan dan menyebabkan fluktuasi harga di pasar.
4. Masih minimnya produksi telur ayam di Kabupaten Buleleng, khususnya peternak di Kabupaten Buleleng sehingga masih membutuhkan pasokan telur ayam dari luar Kabupaten Buleleng.
5. Ketergantungan pada komoditas pangan yang harganya volatile (bergejolak).
6. Permintaan tinggi menjelang momen-momen tertentu.
7. Kurangnya Masyarakat Buleleng untuk mengkonsumsi komoditas pangan lokal.
8. Koordinasi lintas sektor yang perlu ditingkatkan.
9. Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan
10. Durabilitas komoditas pangan tertentu (holtikultura) yang tidak tahan

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Buleleng pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga lonjakan harga barang khususnya beras disaat produksi petani menurun

maka Perumda Swatantra melakukan penyerapan secara optimal baik di dalam kabupaten Buleleng maupun diluar Kabupaten Buleleng dengan melakukan kerja sama antar perumda yang ada di kabupaten buleleng ,maupun yang di luar Kabupaten Buleleng sebagai penghasil beras.

2. Untuk menjaga stabilisasi harga telur maka Perumda Swatantra mengutamakan secara penuh penyerapan produksi telur Khususnya Petani Telur di Kabupaten Buleleng seperti, Peternak UD. PARAS FARM, UD. BAYU UTAMA, JERO REDIASA TAJUN.
3. Untuk pasokan bawang Merah kita menyerap dari Petani Buleleng baik dari Petani di kecamatan bungkulun maupun Petani di kecamatan gerokgak.
4. Mengajukan dana BTT untuk menunjang kebutuhan dana transportasi pengangkutan produk pangan sehingga harga pangan bisa dikendalikan di pasar.
5. Ketersediaan pasokan Pengembangan Kawasan Hortikultura.
6. Ketersediaan pasokan Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.
7. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
8. Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi).
9. Pengembangan Kawasan Hortikultura.
10. Gerakan Tanam Cabai Rawit Merah
11. Melaksanakan Pemantauan Harga dan Stok Pangan.
12. Pemantauan Alur Distribusi Pangan.
13. Keterjangkauan harga dengan Melaksanakan Operasi Pasar.
14. Optimalisasi peran perumda sebagai off-taker untuk melakukan pembelian

langsung produk hortikultura ke petani dan penjualan kepada pedagang pasar.

1. Pemantauan arus barang masuk dan barang keluar dari Bali.
2. Monitoring persediaan dan harga secara intensif.
3. Peningkatan kerja sama antar Lembaga baik di pusat maupun daerah.

Kelancaran Distribusi (Bantuan Biaya Buruh dan Transportasi).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Buleleng pada Triwulan IV tahun

2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah kurang memberikan dampak yang signifikan untuk pengendalian inflasi dan hanya bersifat jangka pendek, perlu adanya upaya jangka panjang dalam pengendalian inflasi karena kondisi ini terus berlangsung tiap tahunnya.
2. Ketersediaan barang dari pemasok yang terbatas khususnya Minyak Goreng Kita dan terkadang masih di atas HET sehingga perlu adanya subsidi harga dan menjadi biaya dalam pelaksanaan pengendalian inflasi.
3. Melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok secara intensif, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan momen kenaikan permintaan, serta menyiapkan Langkah antisipatif seperti Pelaksanaan GPM (Gerakan Pangan Murah) dan Operasi Pasar
4. Memastikan Rantai Pasok berjalan dengan baik.
5. Peningkatan produksi komoditas pemicu inflasi.
6. Pengamanan ketersediaan dan pasokan.
7. Intensitas Yang berkesinambungan dalam pemantauan harga, stok di Petani dan

Pengepul.

8. Pengamanan Harga dan Stok Pangan.
  9. Mengintensifkan pelaksanaan pasar murah ke berbagai titik di Kabupaten Buleleng terutama saat menjelang hari raya Keagamaan.
  10. Beras, cabai, bawang merah, minyak goreng dan daging babi menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga, sehingga perlu ada upaya-upaya (intervensi) dari segi penyediaan komoditas dan pendistribusian.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Buleleng pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Anggaran Biaya Subsidi yang memadai Pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran subsidi yang memadai sebagai Upaya untuk menekan kenaikan harga bahan pokok yang dapat memicu inflasi daerah.
2. Memperkuat ketersediaan dan pasokan pangan khususnya produk cabai dengan menambah sentra produksi di daerah.
3. Peningkatan akses pembiayaan bagi petani/memberikan bantuan subsidi untuk biaya produksi bagi para petani sehingga mendukung peningkatan produksi pasokan pangan di Daerah.
4. Perlu adanya teknologi penyimpanan hasil pertanian seperti cold storage atau lainnya untuk menyerap hasil pertanian jika panen berlebih dan bisa dikeluarkan saat persediaan terbatas untuk menjaga harga di pasar dan membantu petani agar hasil produksinya bisa di serap dengan harga yang pantas.
5. Kerjasama petani/kelompok tani dengan Perumda Swatantra dan Perumda Pasar Argha Nayottama terkait pembelian hasil panen petani.
6. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan gerakan tanam.
7. Menjaga Konsistensi koordinasi dalam penanganan Inflasi dengan Dinas atau instansi

terkait.

1. Pengendalian harga komoditas pangan yang bergejolak (volatile food) serta penguatan ketahanan pangan produksi lokal.
2. Antisipasi inflasi musiman serta hari besar keagamaan
3. Program Kemitraan dengan pihak produsen atau petani.
4. Ketersediaan Anggaran Biaya yang memadai, untuk subsidi komoditas yang mempengaruhi Inflasi
5. Perlu untuk terus melakukan pembinaan serta pengawasan untuk memastikan lancarnya distribusi pupuk hingga diterima oleh petani.
6. Tersedianya anggaran Sosialisasi Kenyang Tidak Harus makan nasi dan Diversifikasi Pangan.

1. Perangkat Daerah dan stakeholder perlu melakukan intervensi terhadap fenomena kenaikan harga beras, bawang merah, cabai rawit dan daging babi yang

berkepanjangan. Perlu sinergi antara anggota TPID Provinsi agar Upaya-upaya yang dilakukan efektif dan berdampak.

2. Mendorong implementasi sistem informasi pengendalian angkutan barang/logistik terintegrasi untuk pemantauan arus distribusi agar dapat berjalan baik.
3. Perlu dipercepatnya kegiatan/pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi stabilitas harga pangan.
4. Menjaga konsistensi koordinasi dalam penganggaran inflasi dengan instansi terkait.